



Ujian Nasional Jadi Penentu Kelulusan

■ Menanti Regulasi Pergantian PPDB Zonasi Menjadi Domisili



Yang penting kualitas semua sekolah itu sama, baik di desa atau kota, setidaknya tidak terlalu timpang.

YOGYA, TRIBUN - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI mewacanakan perubahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi menjadi domisili. Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa juga bakal digulirkan kembali.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) di empat kabupaten dan satu kota DIY satu pandangan untuk terlebih dulu menunggu informasi detail soal aturan tersebut. Semakin cepat aturan mengenai regulasi itu turun ke daerah, maka akan semakin baik.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta,

• ke halaman 7

- Kegiatan sebelum masuk kelas, meliputi senam pagi minimal dua kali seminggu untuk meningkatkan semangat dan kebugaran fisik menyanyikan lagu "Indonesia Raya" sebelum masuk kelas, dan berdoa sebelum belajar.
- Ujian nasional (UN) kembali diadakan mulai SD dan SMP (2026) hingga SMA (2025). UN SMA digelar mulai November 2025 agar hasil ujian bisa jadi bahan pertimbangan perguruan tinggi yang akan menerima siswa lulusan kelas 12.
- Sistem baru PPDB yang dinilai berdasarkan jarak rumah tinggal dengan sekolah. PPDB terbaru juga akan melibatkan banyak sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri.
- Renovasi sekolah yang difokuskan pada 10.000 sekolah tahun ini. Pemerintah juga sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,1 triliun untuk melakukan renovasi sekolah yang rusak.
- Kenaikan tunjangan guru sebesar Rp2 juta untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru saja melakukan sertifikasi.
- Guru berstatus ASN dan PPPK bisa mengajar di sekolah swasta dengan beberapa syarat dan dinilai oleh tim pertimbangan.



GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

Ujian Nasional

• Sambungan Hal 1

Budi Santosa Asrori mengaku belum mendapatkan informasi secara mendetail terkait perubahan sistem zonasi menjadi domisili tersebut.

"Itu tidak berdasarkan KK, tapi berdasarkan kondisi riil di mana anak itu tinggal. Domisili bisa dibuktikan dengan KK juga, ada yang bilang begitu. Sekarang tinggal menunggu saja, karena masih akan diujicobakan minggu depan di Jakarta," kata Budi, Jumat (24/1).

Namun, selaras dengan penjelasan dari Kemendikdasmen RI, bahwa sistem baru tersebut bakal mengedepankan jarak rumah ke sekolah sebagai kriteria utama, bukan penilaian berbasis dokumen kependidikan.

Budi tak menampik, fenomena menumpang Kartu Keluarga (KK) selama ini menjadi problem yang sering kali dikehendaki dalam jalur zonasi di Kota Yogyakarta. "Tapi kami administrasinya sudah sesuai aturan. Aspek akuntabilitas dan taat pada aturan, itu saja yang kami pegang," ungkapnya.

Ia menegaskan, secara garis besar, PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Yogyakarta sudah mengombinasikan sistem yang mengkomodir seluruh peserta didik. Baik itu, calon siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, kurang mampu, disabilitas, hingga murid berprestasi.

"Ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah. Kami sudah mengkomodir semuanya di PPDB SD dan SMP," katanya.

"Terkait UN sebagai penentu kelulusan siswa, Budi memberikan respons positif, meski di DIY selama ini sudah menerapkan Asesmen Standar Nasional Pendidikan Daerah (ASPD), UN yang menjadi dasar kelulusan peserta didik, diyakini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

"UN menjadi alat seleksi PPDB yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Itu diharapkan menjadi alat untuk memotivasi anak supaya rajin belajar," ungkap Budi.

Di samping itu, ia menyebutkan, hasil UN bisa dijadikan patokan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang selama ini skema-skenanya pengantarnya memuat prosedur dan kontra dari warga masyarakat.

Meski demikian, Budi masih menanti kepastian pelaksanaan UN dari Kemendikdasmen, karena sampai sejauh ini informasi yang diterimanya baru sebatas dari media massa. "Apapun nanti keputusan pemerintah terkait dengan asesmen, kami akan mengikuti," cetusnya.

Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto berharap agar regulasi atau aturan pasti soal PPDB dengan sistem baru tersebut segera terbit. Tujuannya, agar Disdikpora Kabupaten Bantul bisa segera mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan peraturan baru itu.

Akan tetapi, Nugroho menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan panitia terkait sistem baru tersebut. Kemudian, akan disampaikan ke Bupati Bantul untuk dilakukan pengesahan. "Misalnya ada hal-hal lain, maka akan kami sesuaikan," urai Nugroho.

Nugroho memperkirakan, regulasi tersebut dimungkinkan turun awal Februari 2025. "Lebih cepat lebih baik. Kalau bisa Januari 2025, regulasinya turun karena ada penyusunan peraturan bupati yang tidak sebentar," ucap dia.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Wahyudi menilai perlu ada kajian mendalam soal kebijakan baru tersebut, baik skema pelaksanaan PPDB yang kini menjadi SPMB dan juga UN.

Pihaknya pun juga perlu berdiskusi dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota DIY lainnya.

Sebab selama ini pelaksanaan arahan dari pusat menyesuaikan kondisi di daerah. Pemerintah daerah pun diberi keleluasaan untuk mengatur penerapan arahan sesuai kondisi masing-masing.

Kajian juga diperlukan untuk pelaksanaan UN. Apalagi di DIY sudah ada ASPD (Asesmen Standar Nasional Pendidikan Daerah), yang menurut Nur sudah setara dengan UN. "Perlu ada komunikasi dengan kabupaten/kota lainnya agar ada persamaan persepsi," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana mengaku belum mendapatkan informasi lebih detail dan masih menunggu petunjuk teknis maupun pedoman pelaksanaan dari ke-

bijakan tersebut.

"Ini belum ada aturan hitam di atas putihnya, kami belum dapat informasi apa-apa. Kami masih menunggu kebijakan terbaru. Kalau tahun ajaran ini belum diberlakukan, maka kita di DIY se-pakat masih ASPD," kata Ery.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh UN pada tahun ini hanya diberlakukan untuk jenjang pendidikan menengah atas SMA/SMK.

Sedangkan jenjang SD/ SMP, yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, belum diberlakukan. Ujian nasional bagi pendidikan dasar dan menengah dimungkinkan baru diberlakukan tahun depan.

Adapun soal PPDB zonasi yang berganti menjadi domisili, pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. "Pada akhirnya kami senduku daerah (stap melaksanakan tugas), tegak lurus dengan (kebijakan) Kemendikdasmen," imbuh dia.

Lebih kompetitif
Roni (44), warga Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul mengaku, belum bisa berkomentar banyak soal rencana perubahan jalur zonasi menjadi domisili dan pengadaaan kembali UN. "Karena menurut saya, sampai saat ini, aturan itu belum jelas," tuturnya.

Meski demikian, pihaknya berharap penerimaan peserta didik baru nanti dapat diberikan dengan sistem yang benar-benar adil. Jangan seperti penerimaan PPDB sebelumnya yang menggunakan sistem zonasi.

"Kalau sistem zonasi tidak adil, karena yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa jadi dapat sekolah yang jauh. Begitu sebaliknya," ucap Roni.

Untuk UN yang akan kembali diadakan, Roni menilai bahwa sistem tersebut cukup positif dan meningkatkan daya saing kecerdasan anak yang kompetitif. "Kalau ada sistem UN lagi, menurut saya anak-anak jadi lebih kompetitif dalam menimba ilmu di sekolah," kata dia.

Sementara itu, Dodon (48), warga Kapanewon Jetis, mengaku, mendukung dengan program pemerintah yang baru dalam meningkatkan mutu pendidikan. "Selama itu positif, saya akan dukung itu," tutup dia.

Sementara itu, salah satu orang tua murid, Nurcahyo (39) mengaku belum terlalu mengikuti perkembangan terkait perubahan aturan itu. Namun jika memang disesuaikan dengan jarak rumah, maka akan lebih mudah.

"Kalau dulu kan, sistemnya harus memakai data kependudukan, terkadang ada yang sudah pindah domisili tetapi belum mengurus data jadi sangat merepotkan. Dengan sistem yang sekarang karena mengukurnya dari rumah maka pasti lebih dekat," terang dia.

Menurut dia, sebenarnya yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan bukanlah soal jarak rumah dengan sekolah. Tetapi, bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi bahwasanya seluruh sekolah bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik.

"Dengan begitu, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, sebab mau sekolah dimana pun anak dipastikan mendapatkan porsi pendidikan yang sama tadi," ujarnya.

Evi, orang tua siswa asal Kapanewon Pengasih, Kulon Progo mengaku setuju jika UN kembali diberlakukan. UN ini jadi motivasi pelajar untuk lebih semangat belajar, sebab sejak tidak UN mereka mengesampingkan belajar karena sudah pasti diterima sekolah," jelas Evi.

Evi yang memiliki anak kelas 2 SMP ini melihat, UN akan membuat pelajar terbiasa dengan target, usaha, dan persaingan nilai. Persingan nilai ini pun bisa menjadi dasar dari proses penerimaan pelajar di sekolah, tidak hanya zonasi.

Dengan sistem zonasi, Evi merasa persaingannya hanya berdasarkan kedekatan jarak pelajar dengan sekolah yang dituju. Sedangkan jika mengacu pada nilai, maka proses penerimaan pelajar akan lebih ideal.

"Anak saya pun juga senang kalau ada UN, sebab dia jadi punya target yang harus dicapai, tidak hanya sekadar masuk sekolah," ujarnya.

Nuraini, warga Sleman, menilai perubahan sistem PPDB dari zonasi ke domisili terkesan hampir serupa. Artinya tidak berbeda jauh. Hal paling penting menurut dia adalah pemerataan kualitas sekolah, baik sekolah di desa maupun di kota. Yang penting kualitas semua sekolah itu sama, baik di desa atau kota, setidaknya tidak terlalu timpang," katanya. (aka/rit/als/nel/ndg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005